

**PENGARUH PEMEKARAN DESA TERHADAP
EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK
(STUDI KASUS DI KECAMATAN INDRA MAKMUR
KABUPATEN ACEH TIMUR)**

TESIS



**OLEH :
HANAFIAH DARWIN SM
021801023**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2004**

**PENGARUH PEMEKARAN DESA TERHADAP
EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK
(STUDI KASUS DI KECAMATAN INDRA MAKMUR
KABUPATEN ACEH TIMUR)**

Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area

TESIS



OLEH :
HANAFIAH DARWIN SM
021801023

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2004**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

J u d u l : PENGARUH PEMEKARAN DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS DI KECAMATAN INDRA MAKMUR KABUPATEN ACEH TIMUR)

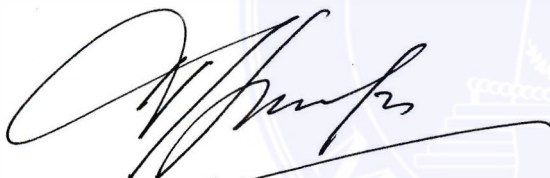
N a m a : HANAFIAH DARWIN SM

N P M : 021801023

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Kariono, MA

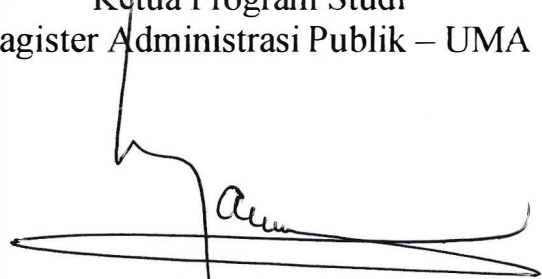


Drs. Humaizi, MA

Direktur
Pascasarjana- UMA

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik – UMA

Drs. Heri Kusmanto, MA



Drs. Usman Tarigan, MS

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis
Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik
Universitas Medan Area

Pada Hari : Sabtu
Tanggal : 27 Nopember 2004
Tempat : Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik
Universitas Medan Area.

PANITIA PENGUJI

Ketua : Drs. Heri Kusmanto, MA (.....)

Sekretaris : Taufik Siregar, SH, M.Hum (.....)

Anggota I : Drs. Kariono, MA (.....)

Anggota II : Drs. Humaizi, MA (.....)

Anggota III : Drs. Usman Tarigan, MS (.....)

ABSTRAKSI

PENGARUH PEMEKARAN DESA TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK STUDI KASUS DI KECAMATAN INDRA MAKMU KABUPATEN ACEH TIMUR

Nama : Hanafiah Darwin SM
N I M :
Program : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Drs. Karyono, MSi
Pembimbing II: Drs. Humaizi, MSc

Harus diakui bahwa secara umum pembangunan di daerah pedesaan di Indonesia masih mengalami ketimpangan dibandingkan dengan daerah-daerah perkotaan. Pada situasi yang normal saja pun kondisi daerah pedesaan sudah mengalami kesenjangan yang cukup parah, apalagi dengan situasi dan kondisi seperti di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengalami konflik bersenjata.

Satu-satunya harapan masyarakat pedesaan, khususnya di provinsi NAD adalah bersumber dari pelayanan yang di berikan oleh pemerintah (Pemerintah Daerah). Oleh karena itu peningkatan pelayanan publik di Provinsi NAD, khususnya oleh aparatur pemerintahan desa tidak sekedar memenuhi pencanangan tahun Peningkatan Pelayanan Publik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia melalui surat nomor 11/M.PAN/1.2004, maupun program -- program lainnya. Tetapi jauh lebih penting adalah mengembalikan dan meningkatkan fungsi sosial masyarakat pedesaan Provinsi NAD yang telah mengalami degradasi yang cukup lama.

Oleh karena itu upaya pemekaran desa sebagai salah satu upaya yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa sudah saatnya di ketahui efektifitasnya.

Berdasarkan uraian – uraian diatas, maka masalah yang ingin dikaji dalam penelitian inia adalah : “Sejauhmana pengaruh pemekaran desa di kecamatan Indra Makmu terhadap efektifitas pelayanan publik?”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pelayanan publik dari aparatur pemerintahan desa yang dimekarkan dengan desa yang belum dimekarkan di Kecamatan Indra Makmu kabupaten Aceh Timur. Sampel diambil secara acak sederhana sebanyak 60 orang yang jumlahnya representatif dengan kedua tipe desa yang menjadi wilayah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengaruh pemekaran terhadap efektifitas pelayanan publik di ketemukan khususnya dalam hal penggunaan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan urusan-urusan pelayanan administratif. Namun dalam hal biaya-biaya pengurusan dan pemberian bantuan kepada masyarakat tidak terdapat perbedaan antara desa yang belum dimekarkan dengan yang sudah dimekarkan

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah ***“Pengaruh Pemekaran Desa Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik: Studi Kasus di Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur”***. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu segala saran dan kritik dari pembaca guna penyempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung membimbing penulisan tesis ini maupun secara tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Zulkarnaen Lubis, MS, Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, Direktur PPs Magister Administrasi Publik, sebagai Pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan dan kritikan demi terselesainya tesis ini.
3. Bapak Drs Usman Tarigan, MS, Ketua Program Studi MAP sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah banyak memberikan dorongan kepada penulis.

4. Bapak Drs Kariono, MA, Pembantu Direktur I Bidang Akademik, sekaligus sebagai Pembimbing I, yang dengan kesabarannya memberikan bimbingannya kepada penulis.
5. Bapak Drs. Humaizi, MSc, sebagai Pembimbing II, yang dengan kesabarannya memberikan bimbingannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik.
6. Bapak Bupati Kabupaten Aceh Timur, atas izin belajar yang diberikan kepada penulis.
7. Bapak Camat Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur, atas segala bantuan dan fasilitas yang diberikan selama penulis mengadakan penelitian di lapangan.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Terima kasih pula kepada kedua orang tua, istri, anak-anak dan seluruh keluarga, yang tidak pernah putus mengalirkan do'a dan memompakan semangat demi keberhasilan penulis.

Semoga segala bantuan mereka menjadi amal shaleh dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kiranya tetap mendapat taufik dan rahmat Allah Subhanahu wata'ala, Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, November 2004
Penulis

Hanafiah Darwin SM

Daftar Isi

BAB-I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6

BAB-II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pergeseran Pelayanan Paradigma Pelayanan Publik	7
B. Tantangan yang Dihadapi Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	9
C. Kerangka Konseptual Kualitas Pelayanan Publik	11
D. Pemekaran Desa sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik	20
E. Hipotesis	22
F. Defenisi Konsep	23
G. Defenisi Operasional	23

BAB-III: METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Populasi dan Sampel	26
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisa Data	28

BAB-IV: KARAKTERISTIK RESPONDEN

A. Klassifikasi Responden Berdasarkan Status Kependudukan	30
B. Klassifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	30
C. Klassifikasi Responden Berdasarkan Usia	31
D. Klassifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan	31
E. Klassifikasi Responden Berdasarkan Status Perkawinan	32
F. Klassifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan	32

G. Klassifikasi Responden Berdasarkan Rata-rata Penghasilan	33
BAB-V: TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PELAYANAN PUBLIK	
A. Tanggapan Responden tentang Lama Waktu Pengurusan	34
B. Persyaratan Yang Ditentukan	38
C. Biaya Pengurusan	43
D. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	48
BAB-V: ANALISIS STATISTIK	
A. Model Uji Statistik	52
B. Analisis Statistik dan Interpretasi Data	53
BAB-VI: KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan:	66
B. Saran	67

Daftar Pustaka

Daftar Tabel

Tabel.1	: Defenisi Operasional Variabel Penelitian	Hal 24
Tabel.2	: Perkiraan Besar Sampel Penelitian Pada Masing – Masing Desa Penelitian	27
Tabel.3	: Klasifikasi Responden Berdasarkan Status Kependudukan	30
Tabel.4	: Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	31
Tabel.5	: Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia	31
Tabel.6	: Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan	32
Tabel.7	: Klasifikasi Responden Berdasarkan Status Perkawinan	32
Tabel.8	: Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan	33
Tabel.9	: Klasifikasi Responden Berdasarkan Rata-rata Penghasilan	33
Tabel.10	: Tanggapan Responden Atas Lama Waktu Penyelesaian Kartu Tanda Penduduk	34
Tabel.11	: Tanggapan Responden Atas Lama Waktu Penyelesaian Kartu Keluarga	35
Tabel.12	: Tanggapan Responden Atas Lama Waktu Penyelesaian Surat Keterangan Jalan	36
Tabel.13	: Tanggapan Responden Atas Lama Waktu Penyelesaian Surat Keterangan Kelahiran	37
Tabel.14	: Tanggapan Responden Atas Lama Waktu Penyelesaian Surat Keterangan Kematian	37
Tabel.15	: Tanggapan Responden Atas Lama Waktu Penyelesaian Surat Keterangan Pindah	38

Tabel.16	: Tanggapan Responden Atas Persyaratan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk	39
Tabel.17	: Tanggapan Responden Atas Persyaratan Pengurusan Kartu Keluarga	40
Tabel.18	: Tanggapan Responden Atas Persyaratan Pengurusan Surat Keterangan Jalan	40
Tabel.19	: Tanggapan Responden Atas Persyaratan Pengurusan Surat Keterangan Kelahiran	41
Tabel.20	: Tanggapan Responden Atas Persyaratan Pengurusan Surat Keterangan Kematian	42
Tabel.21	: Tanggapan Responden Atas Persyaratan Pengurusan Surat Keterangan Pindah	43
Tabel.22	: Tanggapan Responden Atas Biaya Pengurusan Kartu Tanda Penduduk	44
Tabel.23	: Tanggapan Responden Atas Biaya Pengurusan Kartu Keluarga	45
Tabel.24	: Tanggapan Responden Atas Biaya Pengurusan Surat Keterangan Jalan	45
Tabel.25	: Tanggapan Responden Atas Biaya Pengurusan Surat Keterangan Kelahiran	46
Tabel.26	: Tanggapan Responden Atas Biaya Pengurusan Surat Keterangan Kematian	47
Tabel.27	: Tanggapan Responden Atas Biaya Pengurusan Surat Keterangan Pindah	48
Tabel.28	: Tanggapan Responden Atas Atas Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan	49
Tabel.29	: Tanggapan Responden Atas Atas Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan	50

Tabel.30	: Tanggapan Responden Atas Atas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial	50
Tabel.31	: Tanggapan Responden Atas Pelaksanaan Kegiatan bantuan Modal Usaha	51
Tabel.32	: Tabel Teoretik Proporsi Tanggapan Responden	53

BAB-I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pro dan kontra mengenai pemekaran suatu wilayah pemerintahan akhir-akhir ini semakin mengemuka dan menjadi isu penting yang mendesak untuk segera dituntaskan, baik secara teoritis maupun praktikal. Isu pemekaran ini menjadi penting karena telah menimbulkan banyak persoalan, bahkan telah menimbulkan konflik fisik antar masyarakat yang pro dan kontra pemekaran.

Walaupun sebenarnya banyak kasus – kasus pemekaran wilayah di tanah air murni didasarkan pada isu dan kepentingan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti kasus pemekaran wilayah kabupaten Tapanuli Utara menjadi Kabupaten Toba Samosir, dan Humbang Hasundutan dan rencana pemekaran Kabupaten Simalungun

Merujuk pada undang – undang, terutama UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pemekaran suatu wilayah, provinsi, kabupaten/ kota maupun desa dimungkinkan dan bertujuan untuk tujuan percepatan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu seyogianya isu pemekaran wilayah harus dikaitkan dan selalu didekati dengan pendekatan yang mampu mengukur sesuai dengan amanat undang – undang tersebut. Namun hingga kini belum banyak studi yang dilakukan berkaitan dengan pemekaran suatu wilayah, bahkan pada tingkat tataran wacana-pun isu yang sesuai dengan tuntutan undang-undang masih terbatas. Pada hal informasi

dan pengembangan mengenai wacana pemekaran yang berkaitan dengan tujuan undang-undang sangat dibutuhkan. Sebab tuntutan terhadap pemekaran suatu wilayah, provinsi, kabupaten/kota maupun desa di tanah air terus bergulir dan semakin meningkat jumlahnya.

Oleh karena itu tampaknya studi mengenai pemekaran di tanah air sejalan dengan implementasi Undang – Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah semakin mendesak untuk dilakukan, karena dipastikan tuntutan terhadap pemekaran wilayah suatu daerah tetap meningkat dan dikhawatirkan isu Pemekaran dijadikan sebagai alat untuk kepentingan-kepentingan yang tidak berhubungan dengan tujuan pemekaran yang semestinya.

Seperti halnya di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang telah memiliki status keistimewaan melalui Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan Undang-Undang RI No 44 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi daerah Istimewa Aceh yang berbeda dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, nuansa pemekaran suatu wilayah lebih intens dan lebih memungkinkan terjadi. Terutama sejak ditetapkannya Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi NAD dan Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Garapeng dalam Provinsi NAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Bysob, M.J., *Strategic Planning for Public and Non Profit Organization : A Guide to Strengthening and Sustaining Organization Achhievement*, Revised Edition, Joseey-Bass Inc., San Fransisco, 1995
- Djamin, Awaloeddin, *Kabinet Persatuan Nasional dan Reformasi Aparatur Administrasi Negara*, dalam Majalah Manajemen Pembangunan, No. 29 Tahun IXC, Februari 2000
- Dwiyanto, Agus, *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*, Seminar Sehari dalam Rangka Purna Tugas Drs. Sedyono, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 20 Mei 1995
- Edvardsson, Bo., Bertil Thomason, and John Ovreteit., *Quality of Service : Making it Really Work*, McGraw-Hill Book Company, London, 1994.
- Faozan, Haris, *Mencermati Eksistensi Pelayanan Sektor Publik : Pergeseran Paradigma, Tantangan, Kepemimpinan dan Pemberdayaan*, Dalam Jurnal Administrasi Publik, Volume 2, Oktober 2003.
- Fernanda, Desy., *Pengembangan Kualitas Pelayanan Publik di Daerah, dalam Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2, Oktober 2003
- Farago, J. & Skyrme, D.J *The Learning Organization*, 1995 [Http://www.skyrme.com/insight/31rnorg.htm](http://www.skyrme.com/insight/31rnorg.htm). dikutip oleh Faozan, Haris, *Mencermati eksistensi Pelayanan Sektor Publik : Pergeseran Paradigma, Tantangan, Kepemimpinan dan Pemberdayaan, dalam Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2, Oktober 2003.
- Rahmat, Jalaudin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Remaja Karia, Bandung, 1989.
- Turner M., *Implementing Accountability in Autonomous Region, Discussion Paper in Interim WorkShop "Support for Urgentand Important in Dezentralization Process"*, ABD-DEPDARI, Jakarta 27-28 Juli 2000.
- Zeithaml, Valarie A., A. Parasuraman, dan Leonard L. Berry., *Delivering Quality Service : Balancing Customer Perception and Expectation*, The Free Press, New York, 1990. dikutip oleh Fernanda, Desy., *Pengembangan Kualitas Pelayanan Publik di Daerah, dalam Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2, Oktober 2003.

Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 *tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas KKN.*

Undang-Undang 25 Tahun 1999 *tentang Pemerintahan Daerah.*

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1995 *Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.*

Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 *Tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum.*

Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 *Tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi NAD.*

Berita Koalisi NGO HAM Aceh, <http://www.koalisi-ham.org/info>.

Harian SIB, 19 November 2002; 17 Oktober 2002; 3 September 2002; 14 November 2003; 15 Maret 2003;

Laporan Liputan 6 SCTV : Ambon Berdarah On-Line, <http://www.go.to/ambon>

<http://www.papuanews.com/article45.html>.

<http://www.ips.org.indonesia/riau.html>.

<http://www33.brinkster.com/cybersimalingun/berita.aspd?id=313>.

www.kompas.com/kompas-cetak/0304/24/daerah/275489.htm.

www.westpapua.net.

www.westpapua.net/news/03/11/141103 asmuruf.